

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI GAMPONG
ALUE NAGA KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

Fatin Natasya
NPP. 31.0012

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email : 31.0012@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi : Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si
Email : andi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *Poverty is one of the branches of the problem – another problem, the problem of poverty can lead to significant social and economic inequalities. In an effort to address this problem, the Indonesian Government has implemented various policies and programmes to combat poverty, one of which is the Hope Family Program. (PKH). Purpose* : *This study aims to evaluate poverty alleviation related through the Hope Family Program (PKH) in Gampong Alue Dragon. Method*: *This research method uses descriptive methods. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. This research uses William N. Dunn's evaluation theory. There are several criteria for policy evaluation according to William N Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, hardness, responsiveness and accuracy. Result*: *The authors' findings in this study are that the implementation of the program has not yet reached the target. This is due to a number of impeding factors: 1) the poor quality of education of the Gampong Alue Dragon community, 2) the lack of accurate data, 3) too frequent system changes, 4) lack of socialization of officers and implementers in the area, and 5) still lack of empowerment of the gampong community so that the community is used to only as a recipient of aid but no further management is carried out. Conclusion*: *Based on the results of this study, it can be concluded that the evaluation of poverty reduction through the Hope Family Program (PKH) in Gampong Alue Dragon has not achieved optimal results. From the results of this research, the author's advice is that in the maintenance of this program, the government should continue to make improvements in its implementation and also need to update appropriate and valid data, improve education and information for the public as well as strengthening monitoring and evaluation.*

Keywords: *Evaluation, Family Hope Program, Gampong*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi cabang dari masalah – masalah lainnya, permasalahan kemiskinan dapat mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan. Dalam upaya guna mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan serta program guna menanggulangi kemiskinan yang terjadi, salah satunya ialah Program Keluarga Harapan (PKH). **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi terkait penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga. **Metode :** Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N Dunn. Terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. **Hasil/ Temuan :** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan program tersebut masih belum mencapai sasaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu 1) rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Gampong Alue Naga, 2) ketidaktersediaan data yang akurat, 3) perubahan sistem yang terlalu sering, 4) kurangnya sosialisasi terhadap petugas serta pelaksana di daerah, dan 5) masih kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat gampong sehingga masyarakat hanya terbiasa sebagai penerima bantuan namun tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga belum mencapai hasil yang optimal. Dari hasil penelitian ini, saran yang diberikan oleh penulis yaitu Dalam penyelenggaraan program ini pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dalam implementasinya dan juga diperlukan pembaruan data yang tepat serta valid, melakukan peningkatan edukasi dan informasi bagi masyarakat serta penguatan monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Gampong

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan yang tidak terlepas dari negara – negara berkembang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi serta menjadi sorotan utama bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang menghambat suatu negara untuk bergerak maju.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2022) mencatat bahwa pada september 2022 penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi salah satunya ialah provinsi paling ujung sumatera yaitu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh yang memiliki

Ibu Kota Banda Aceh ini tercatat memiliki penduduk miskin sejumlah 806,82 ribu jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022.

Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan serta membentuk berbagai program untuk menekan tingginya angka kemiskinan. Menurut Dye (dalam Dr.Taufiqurokhman,2014:150) Kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut : "Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu program yang diterapkan oleh pemerintah adalah membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial (RI, K. S, 2021)

Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dijalankan sejak tahun 2007 yang dilakukan percobaan pada tujuh provinsi dan 48 kabupaten/kota dan kemudian diselenggarakan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia pada tahun 2012. Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang menerima bantuan PKH pertama pada tahun 2013. Berikut ini disajikan data kemiskinan di Provinsi Aceh.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1.	2019	819,44 ribu jiwa
2.	2020	833,91 ribu jiwa
3.	2021	834,24 ribu jiwa
4.	2022	806,82 ribu jiwa

Sumber : diolah dari data BPS Prov Aceh

Dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilakukan secara merata pada setiap daerah pada Provinsi Aceh, salah satunya ialah Kota Banda Aceh yang memiliki 9 kecamatan. Dari 9 kecamatan yang adapada Kota Banda Aceh ini, Kecamatan Syiah Kuala ialah kecamatan dengan jumlah terbanyak sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut disajikan data rekapitulasi PKH di Kecamatan Kota Banda Aceh.

Tabel 1.2 Rekapitulasi PKH Kecamatan Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	2021	2022
1.	Baiturrahman	494	415
2.	Banda Raya	364	323
3.	Jaya Baru	307	255
4.	Kuta Alam	393	298
5.	Kutaraja	402	361
6.	Leung Bata	383	337
7.	Meuraxa	443	388
8.	Syiah Kuala	581	491

9.	Ulee Kareng	546	484
----	-------------	-----	-----

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan data rekapitulasi tersebut, Kecamatan Syiah Kuala masih menjadi kecamatan dengan penerima bantuan terbanyak seperti pada tahun sebelumnya. Pada Kecamatan ini pula terdapat desa atau pada Provinsi Aceh disebut gampong yang memiliki penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak dibandingkan dengan gampong di sekitarnya.

Pada Kecamatan Syiah Kuala terbagi atas 10 gampong. Salah satu Gampong di Kecamatan Syiah Kuala ialah Alue Naga. Gampong Alue Naga ialah gampong yang paling banyak menerima PKH dibandingkan gampong lainnya yaitu berjumlah 168 orang. Gampong atau desa ini juga memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan yang terjadi.

Program Keluarga Harapan ini tidak hanya perlu dilakukan evaluasi akan tetapi perlu diketahui pula bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik yang tidak kalah penting, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan" (Pramono, 2020).

Berikut disajikan data penerima PKH di gampong pada Kecamatan Syiah Kuala :

Tabel 1.3 Data penerima PKH di Gampong Kecamatan Syiah Kuala

No.	Gampong	Penerima PKH
1.	Alue Naga	168
2.	Deah Raya	69
3.	Iemasen Kaye Adang	56
4.	Jeulingke	54
5.	Kopelma Darussalam	15
6.	Lamgugob	24
7.	Peurada	20
8.	Pineung	23
9.	Rukoh	73
10.	Tibang	87

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Alasan dipilihnya Gampong Alue Naga dari pelaksanaan program ini yakni Gampong Alue Naga masih menjadi gampong dengan penerima bantuan terbanyak dibandingkan gampong lainnya sedangkan masih terdapat kecamatan serta gampong lain yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak namun yang menerima bantuan tidak sebanding dengan penerima pada Gampong Alue Naga sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait evaluasi program.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan serta penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga sehingga belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data yang telah didapatkan hingga saat ini Gampong Alue Naga masih menjadi gampong dengan penerima terbanyak dibandingkan dengan gampong – gampong lainnya yang berada di Kota Banda Aceh. Jika dilihat berdasarkan data penduduk masih terdapat kecamatan serta gampong lain yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar namun tidak mendapatkan bantuan sebanyak Masyarakat yang berada di Gampong Alue Naga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan salah satunya. Berdasarkan data yang didapat cukup banyak Masyarakat yang belum mengenyam bangku pendidikan serta Masyarakat yang telah merasakan bangku pendidikan didominasi oleh Masyarakat yang hanya menyelesaikan hingga pada tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Faktor pendidikan ini juga selanjutnya akan berdampak pada profesi bagi Masyarakat Gampong Alue Naga.

Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat yaitu ketidaksediaan data yang akurat. Pada pelaksanaan bantuan program apapun tentunya hal yang paling utama ialah terkait dengan data yang harus valid serta terbaru sehingga dalam pelaksanaan serta penyaluran bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan target maupun sasaran yang ingin dicapai.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran bantuan ini ialah perubahan sistem yang terlalu sering dan kurangnya sosialisasi terhadap petugas serta pelaksana di daerah sehingga dapat terjadi data yang berganda dengan bantuan lain serta perbedaan kebijakan pada tiap tiap program.

Serta faktor lain yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat gampong. Masyarakat gampong yang menerima bantuan selanjutnya dapat dilakukan pemberdayaan serta pemberian pendidikan serta pelatihan guna meningkatkan *skill* masyarakat pada Gampong Alue Naga.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks evaluasi kebijakan maupun pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian Nur Aeda dan Riadul Jannah berjudul Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat :Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat (Nur Aeda, Riadul Jannah,2022), menemukan bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Kekait dilihat dari variabel pengukuran efektivitas, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program berjalan dengan efektif. Dengan adanya PKH telah membawa beberapa perubahan kesejahteraan yang nyata kepada keluarga penerima manfaat PKH. (Nur Aeda, Riadul Jannah,2022)

Penelitian Trisna Waty Riza Eryani, Ela Yusrianti yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

Harapan di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur menemukan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak telah memberikan dampak perubahan pada Keluarga Penerima Manfaat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah Keluarga Penerima Manfaat telah mengalami perubahan kearah lebih baik terutama dibidang ekonomi, dan pendidikan. Meskipun secara kesehatan masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan (Eryani & Yusrianti, 2022).

Penelitian Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban) menemukan bahwa Hasil penelitian membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan (Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, 2020).

Penelitian Mohammad Benny Alexandri yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019 menemukan bahwa hasil analisa dari 6 Dimensi Evaluasi Kebijakan, menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kecamatan Cakung Jakarta Timur dinilai telah cukup berhasil dan efektif sebagai salah satu Upaya dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih banyak dalam hal yang harus diperbaiki dari mekanisme pelaksanaannya (Alexandri, 2020).

Penelitian Maya Dehani, Denny Hernawan, Irma Purnamasari yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menemukan bahwa proses pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diluncurkan PKH yaitu dengan harapan mampu memecahkan masalah klasik yang dihadapi RTSM seperti masalah gizi buruk, tingginya kematian ibu dan bayi serta rendahnya partisipasi anak usia sekolah. Target yang dicapai dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Bogor Selatan ini berupa terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita. (Maya Dehani, 2017).

Penelitian Ida Syamsu Roidiah yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menemukan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. (Roidiah, 2016).

Penelitian Anggraeni dan Nugroho yang berjudul Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia menemukan bahwa jumlah penerima PKH masih sedikit baru 2,7% dari angka kemiskinan namun tingkat kepuasan masyarakat 93%. Disisi lain masih adanya penyalahgunaan wewenang sehingga 7% yang ada tersebut harus segera ditangani. Adanya fasilitas konsultasi publik

yang dinamakan Contact Center yang dibuat oleh Kemensos. Sikap integritas pegawainya yang belum kuat mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Saran yang diberikan yaitu memberikan pelatihan ke KPM (Kartu Penerima Manfaat), perbaikan dalam merekrut SDM (Sumber Daya Manusia), dan Pendamping PKH menjadi fasilitator tentang informasi pelatihan dan kursus sertifikasi kepada KPM. (Anggraeni & Nugroho, 2022).

Penelitian Mahmud,dkk yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Komunikasi (Communication) (2) Sumber Daya (Resources) (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi. Faktor penghambat dan pendukung, dimana dapat terjadi disetiap tahap Implementasi pemahaman masyarakat yang masih kurang, jarak tempuh lokasi pendamping jauh sehingga kurang maksimal dan adanya kecemburuan sosial di masyarakat. (Mahmud,dkk,2020)

Penelitian Sahputra yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Langsa Provinsi Aceh menemukan bahwa Implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan didalam kegiatan terkait dengan teknis dalam pelaksanaan PKH, tetapi terkait dengan penyaluran PKH dan juga sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah berjalan dengan baik. Terdapat dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa Provinsi Aceh. Pendukungnya yaitu Konsistensi Pendamping PKH pada saat ini sangat mendukung jalannya program, kecukupan personil yang sudah dimiliki Pendamping PKH dan Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik antar internal maupun eksternal. Sedangkan hambatannya adalah biaya operasional yang belum memadai saat turun ke lapangan, sarana dan prasarana kepada pendamping PKH, dan kepala desa belum aktif dalam melakukan pendataan terhadap warga miskin yang ada di desanya masing-masing. (Sahputra,2023)

Penelitian Suyanti yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) menemukan bahwa efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pengetahuan dan ketepatan tujuan program serta pemantauan program menunjukkan bahwa PKH di Desa Besuki telah berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa aspek keberhasilan PKH pada kehidupan keluarga miskin di Desa Besuki. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial) sudah tercapai, hanya saja pada prinsip keadilan belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) namun belum mendapatkan bantuan PKH. (Suyanti,2022)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang mana terkait konteks yang diambil yaitu terkait dengan evaluasi kebijakan serta penerapan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut W.Creswell (2018:32) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoretis, dimana dalam mempelajari masalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk penyelidikan dan pengumpulan data.

Selain itu pengukuran/ indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori William N Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilihat melalui enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan serta pada penelitian ini dilaksanakan pada Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terkait evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga. Pada metode ini digunakan untuk menyajikan gambaran serta deskripsi sesuai dengan yang terjadi di lapangan terkait peristiwa maupun objek yang akan diteliti.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Penulis melakukan observasi di lapangan terkait bagaimana dalam pelaksanaan serta kondisi langsung yang terjadi, kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa informan mulai dari pihak dinas sosial hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dokumentasi juga diperlukan guna mendukung dalam penelitian ini agar data – data yang diperlukan dapat menunjang hasil penelitian. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh William N Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan meliputi 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menggunakan pendapat dari William N Dunn yang menyatakan bahwa bahwa evaluasi kebijakan meliputi 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

3.1 Efektivitas

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengurangi kemiskinan.

Tabel 1.

Berikut data penerima Program Keluarga Harapan di Gampong Alue Naga :

Tahun	Jumlah Penerima PKH
2022	139
2023	140
2024	168

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pada **Tabel 1** pada tahun 2024 Gampong Alue Naga memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 168 KPM. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 penerima bantuan mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik namun terkait aspek efektivitas ini dirasa belum memberikan efek yang cukup signifikan guna membantu mencukupi kebutuhan masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3.2 Efisiensi

Penulis melakukan pengukuran terhadap efisiensi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga meliputi tenaga kerja atau pendamping PKH pada tiap tiap gampong.

Pada program ini terdapat Tenaga Kerja Sukarela yang bertugas sebagai pengawas serta kontrol agar terlaksana penyaluran bantuan dengan baik sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan data yang telah tersedia serta terdapat pendamping dalam program ini.

Dalam pelaksanaan program ini tentunya jumlah pendamping di tiap kecamatan ini telah terpenuhi dengan baik namun tentunya terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Keterlibatan para pihak pemangku kepentingan ini sangat penting guna menjamin berjalannya program ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai secara bersama – sama.

3.3 Kecukupan

Penulis juga melakukan Analisa terkait kecukupan dalam pelaksanaan program ini. Dalam hal ini kecukupan pada kebijakan publik berarti mengarah kepada kecukupan sumber daya sehingga dapat menggambarkan seberapa memadai sumber daya yang perlu digunakan untuk menerapkan suatu kebijakan

yang telah ditetapkan. Hal ini perlu diperhatikan agar dapat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan salah satu masyarakat sebagai KPM terkait dengan kecukupan yaitu :

“ Dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah alhamdulillah kami merasa sangat terbantu terlebih bantuan ini dapat meringankan beban bagi kebutuhan sekolah anak – anak walaupun masih dirasa kurang cukup tapi kami tetap menerima berapapun bantuan yang diberikan.”

Dalam pelaksanaan program ini terkait dengan sumber daya bagi masyarakat dinilai sudah terlaksana dengan baik namun terkait dengan biaya masih dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.4 Kemerataan

Penulis juga melakukan analisa terkait dengan bagaimana pemerataan dalam penyaluran bantuan yang dapat dilihat berdasarkan keadilan yang dapat diperoleh serta diberikan sasaran kebijakan.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Sekretaris Desa Gampong Alue Naga yang berada di ruangnya menyatakan yaitu :

“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dilaksanakan secara merata di setiap gampong namun terkait dengan peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini masih saja terdapat masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan namun dalam pengecekan data masih terdata sehingga belum merata terhadap masyarakat yang benar - benar membutuhkan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini sudah merata bagi masyarakat yang sudah terdata oleh pemerintah, namun masyarakat yang telah terdata ini belum secara keseluruhan merupakan masyarakat yang benar – benar tepat terhadap sasaran yang dituju sehingga dalam pelaksanaan program ini belum terlihat hasil yang signifikan terkait perubahan pola kehidupan maupun tingkat perekonomian pada masyarakat di Gampong Alue Naga.

3.5 Responsivitas

Penulis memperoleh hasil respon yang baik dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber pada saat di lapangan, maka penulis selanjutnya dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat sedikit banyaknya telah dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut walaupun bagi masyarakat masih merasa belum terpenuhi secara seutuhnya namun bantuan ini memberikan manfaat

yang sangat baik dan juga Masyarakat Gampong Alue Naga memiliki respon yang baik.

3.6 Ketepatan

Penulis juga melakukan pengukuran terkait dengan ketepatan pencapaian program yang telah dilaksanakan. Ketepatan ini berkaitan dengan bagaimana serta sudah sejauh mana suatu kebijakan atau program yang akan dianalisis dapat mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dengan benar serta tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan saat penelitian di lapangan maka dapat diketahui bahwa masih saja terdapat masyarakat – masyarakat yang tidak layak namun menerima bantuan dikarenakan data yang digunakan oleh pemerintah masih menggunakan data yang telah digunakan sejak awal.

3.6 Faktor-Faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga

1. Rendahnya kualitas pendidikan Masyarakat Gampong Alue Naga
2. Ketidaktersediaan data yang akurat
3. Perubahan sistem yang terlalu sering dan kurangnya sosialisasi terhadap petugas serta pelaksana di daerah
4. Masih kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat gampong

3.7 Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Gampong Alue Naga

1. Pemberian Pelatihan serta pendidikan

Dalam mengatasi faktor penghambat maka upaya yang dapat diberikan yaitu dengan pemberian pelatihan kepada peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau dapat disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu dengan melakukan pemberian pelatihan berupa bagaimana cara melakukan manajemen keuangan, memberikan pendidikan serta pelatihan terkait dengan keterampilan hidup dan keterampilan bisnis sehingga masyarakat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang berada di lingkungannya

2. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan program ini juga perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta berkala, sehingga permasalahan – permasalahan terkait dengan data yang tidak akurat, permasalahan lain terkait dengan pengajuan yang belum diterima hingga jangka waktu yang panjang dan konflik – konflik yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan program dapat diredam dan diatasi dengan cepat.

3. Peningkatan koordinasi antara pihak terkait

Koordinasi antar berbagai pihak tentunya sangat penting serta dibutuhkan guna membantu dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar – benar layak.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan membangun Kemitraan dengan pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pihak – pihak terkait dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga perlu memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan manfaat serta cara mengikuti program ini kepada masyarakat yang benar – benar membutuhkan sehingga masyarakat lebih terbuka terhadap program ini dan juga dapat memanfaatkannya secara optimal.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang tepat sasaran dalam menerima bantuan. Gampong Alue Naga merupakan salah satu gampong dengan penerima terbanyak dari bantuan program ini. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam pelaksanaan serta penyaluran program ini masih terdapat beberapa data masyarakat yang belum terbarukan serta sesuai pada fakta di lapangan sehingga menghambat dalam pelaksanaan serta menjadikan program ini tidak berjalan secara optimal. Sama halnya dengan temuan Benny Alexandry bahwa masih banyak dalam hal yang harus diperbaiki dari mekanisme pelaksanaannya.

Layaknya program lainnya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga ini tentunya masih mengalami beberapa kendala mulai dari Tingkat Pendidikan, data yang tidak akurat, perubahan system yang terlalu sering serta kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat sehingga tiap tahunnya untuk penerima PKH atau KPM semakin meningkat. Berbeda halnya dengan temuan Dyah Ayu Virgoreta dan Ratih Nur Pratiwi yang menjelaskan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka Panjang dapat mampu menanggulangi serta mengurangi Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia terutama pada Provinsi Aceh. Dalam pelaksanaan program ini tentunya akan membawa dampak yang positif jika bantuan ini dirasakan dan didapatkan oleh masyarakat yang benar – benar membutuhkan layaknya penelitian Nur Aeda dan Riadul Jannah yang menyatakan bahwa dengan adanya PKH telah membawa beberapa perubahan kesejahteraan yang nyata kepada KPM PKH.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh belum berjalan dengan optimal hal ini ditujukan dengan dimensi evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan pemerataan.

Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu yang pertama ialah rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Gampong Alue Naga, ketidakterediaan data yang akurat, perubahan sistem yang terlalu sering dan kurangnya sosialisasi terhadap petugas serta pelaksana di daerah, dan masih kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat gampong.

Serta upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan pemberian pelatihan serta pendidikan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta berkala, peningkatan koordinasi antara pihak terkait dan juga melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu gampong saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat William N Dunn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan yang ditemukan serta belum mendetail atas berbagai indikator, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Camat Syiah Kuala dan Keuchik Gampong Alue Naga beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 165–186.

Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan
Anggraeni, P., & Nugroho. (2022). Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal Of Public Policy and Applied Administration* Vol 4 No 2 2022

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth). SAGE Publications, Inc

Dehani, M. (2017) Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal GOVERNANSI* p-ISSN 2442-3971; e-

ISSN 2549-7138 Volume 4 Nomor 1, April 2018 Di Kecamatan Cakung
Jakarta Timur Tahun 2019. *JurnalModerat*, 6(2), 237–244.

Dr.Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*,1993,15.

Dunn, William N. (2003). William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf (p. 710)

Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(12), 1–6.

Eryani, T. W. R., & Yusrianti, E. (2022). Dampak Sosial Ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(3), 183–190.

Mahmud, dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, April 2020 Volume 6 Nomor 1

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

RI, K. S. (2021). *Pedoman Pkh.Pdf*.

Roidiah. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita –Oktober 2016*

Sahputra. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Langsa Provinsi Aceh. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: eprint IPDN

Suyanti. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas). UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri..